



OUTLOOK PEMBANGUNAN 2021

Outlook Pembangunan Sosial

Vivi Yulaswati

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan dalam Webinar Outlook Pembangunan 2021
22 Desember 2020

Outlook Pembangunan Sosial

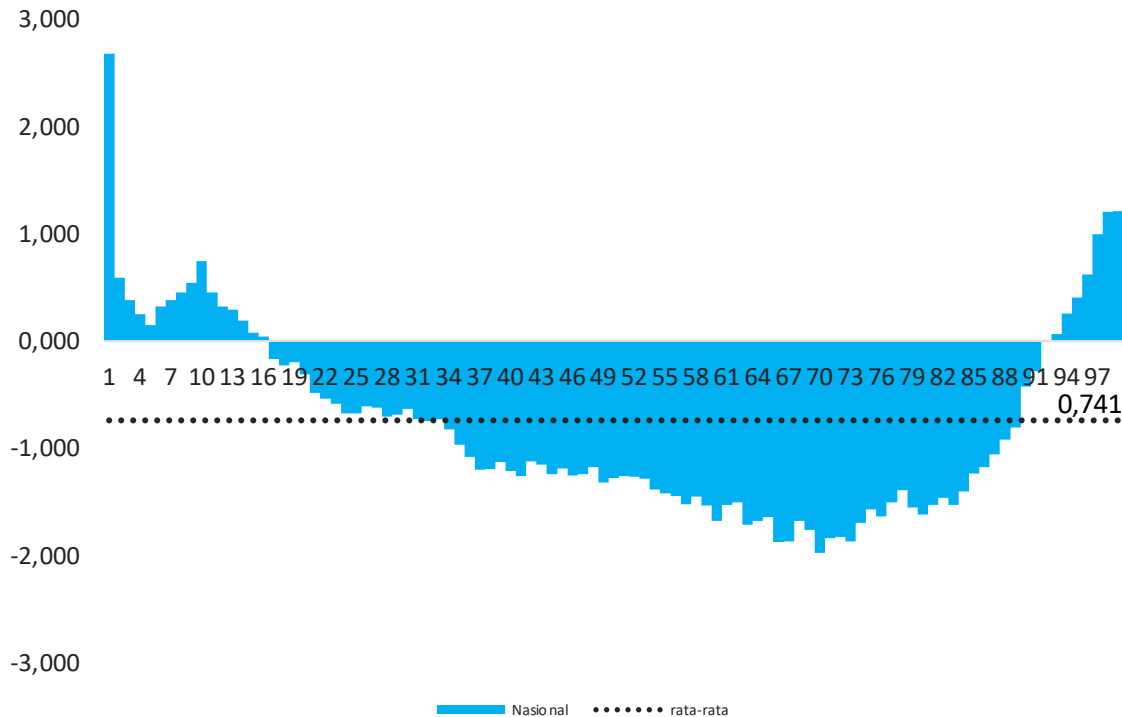
KERANGKA PAPARAN

1. Dampak Covid-19 di masyarakat
2. Capaian dan Tantangan Pembangunan Sosial
3. Arah Kebijakan TA 2021

DAMPAK COVID-19 DI MASYARAKAT

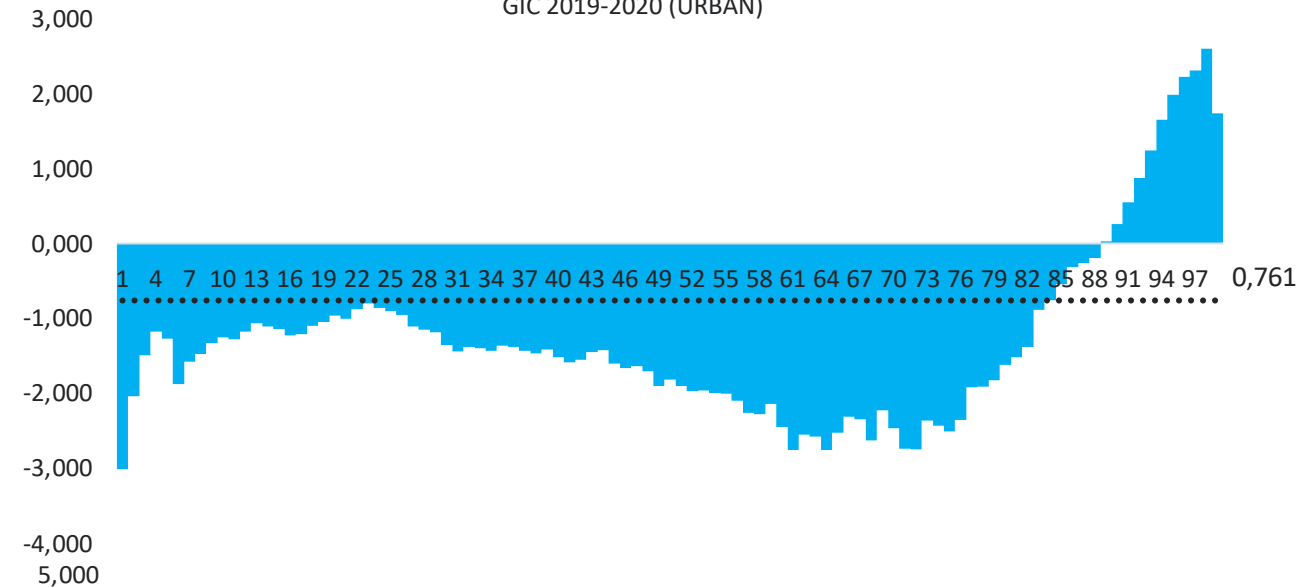
Pandemi Covid-19 Meningkatkan Kerentanan Masyarakat

Growth Incidence Curve/GIC 2019-2020 (NASIONAL)

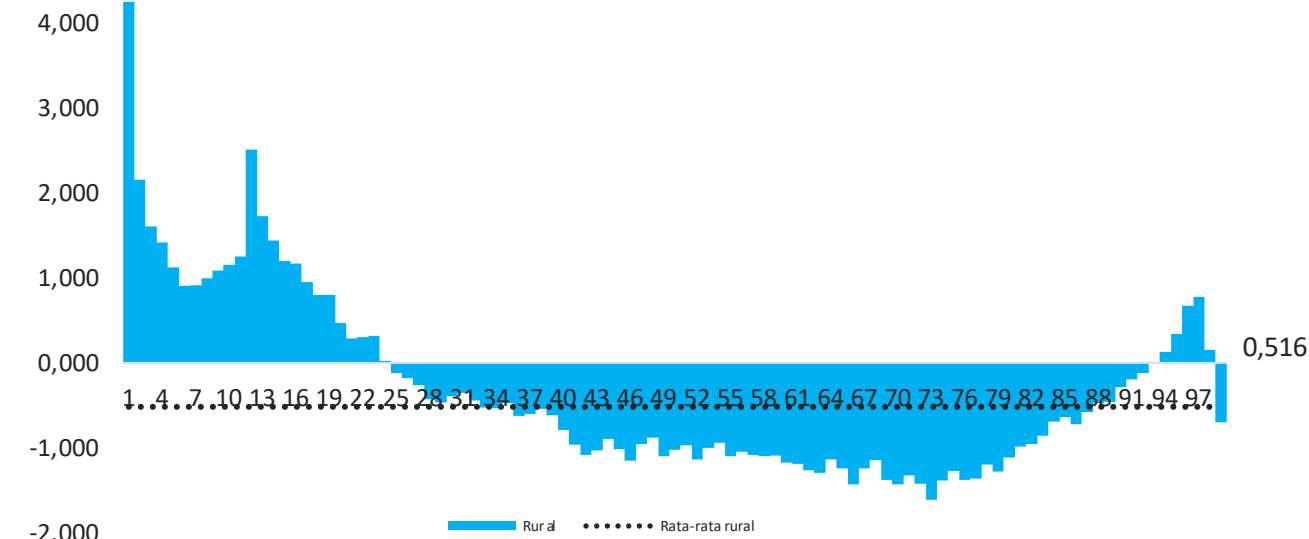


- Meskipun kasus pertama Pandemi Covid-19 baru mulai Maret, tingkat konsumsi masyarakat terutama di perkotaan sudah mengalami penurunan yang signifikan pada awal 2020.
- Kelompok miskin dan rentan di pedesaan relatif belum terdampak. Salah satu penyebabnya yaitu penyempurnaan penggunaan Dana Desa meningkatkan resiliensi mereka.

GIC 2019-2020 (URBAN)

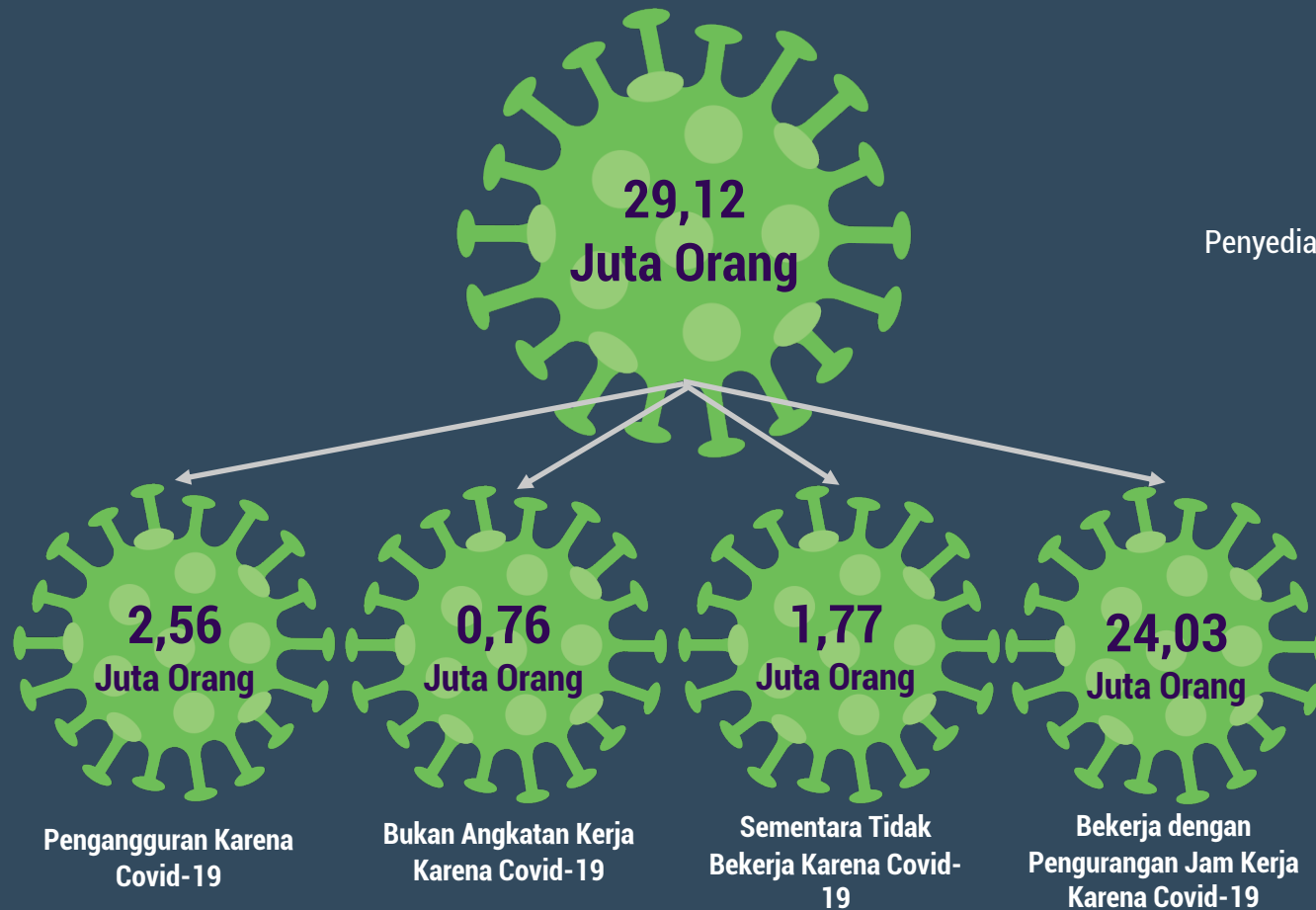


GIC 2019-2020 (RURAL)

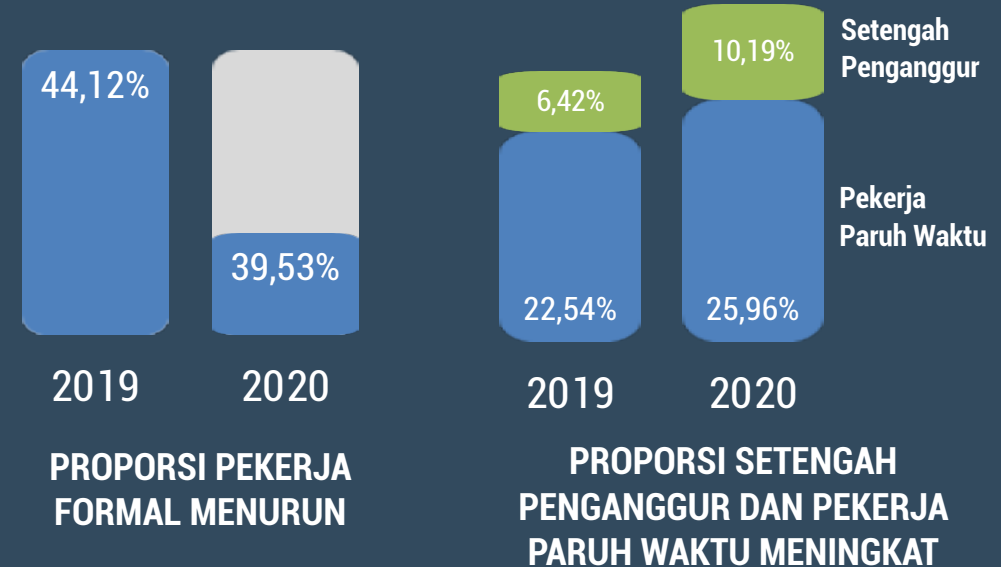


Kerentanan akibat sakit... dan juga penurunan pendapatan akibat pengurangan jam kerja dan PHK

PENDUDUK USIA KERJA YANG TERDAMPAK COVID-19

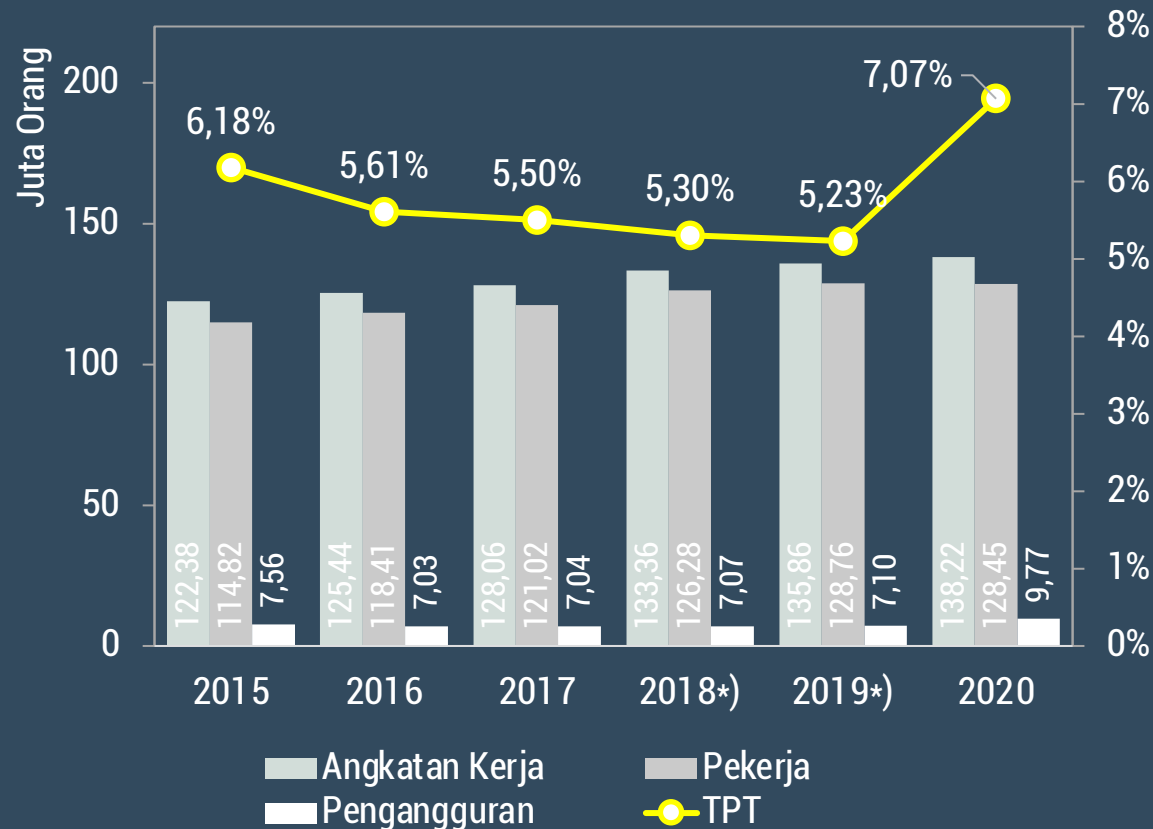


UPAH RATA-RATA PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL MENURUN DI SEMUA SEKTOR



Lapangan kerja menyusut, penganggur meningkat

2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 7,07 persen.



**PENCIPTAAN
KESEMPATAN KERJA**
-301.087
orang



TPT LULUSAN SMK
13,55%
(tertinggi di antara lulusan pendidikan lainnya)



PENGANGGUR
9,77 juta
orang
(+2,67 juta orang)

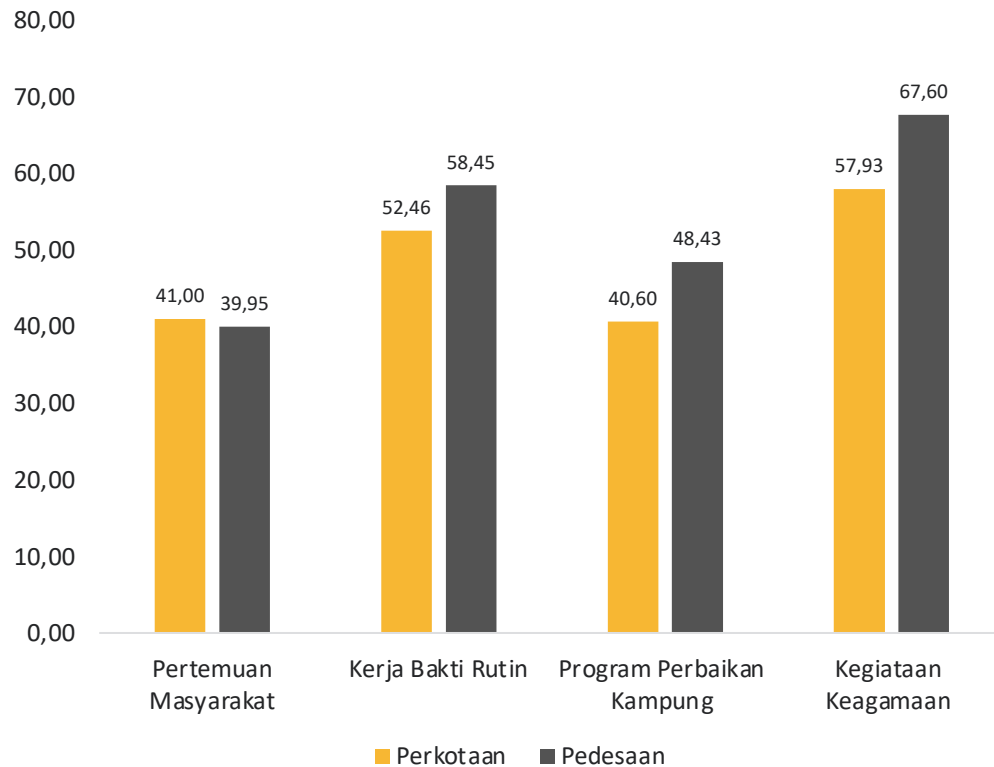


TPT USIA MUDA 15-24
20,46%
(usia 25+ hanya 4,61%)

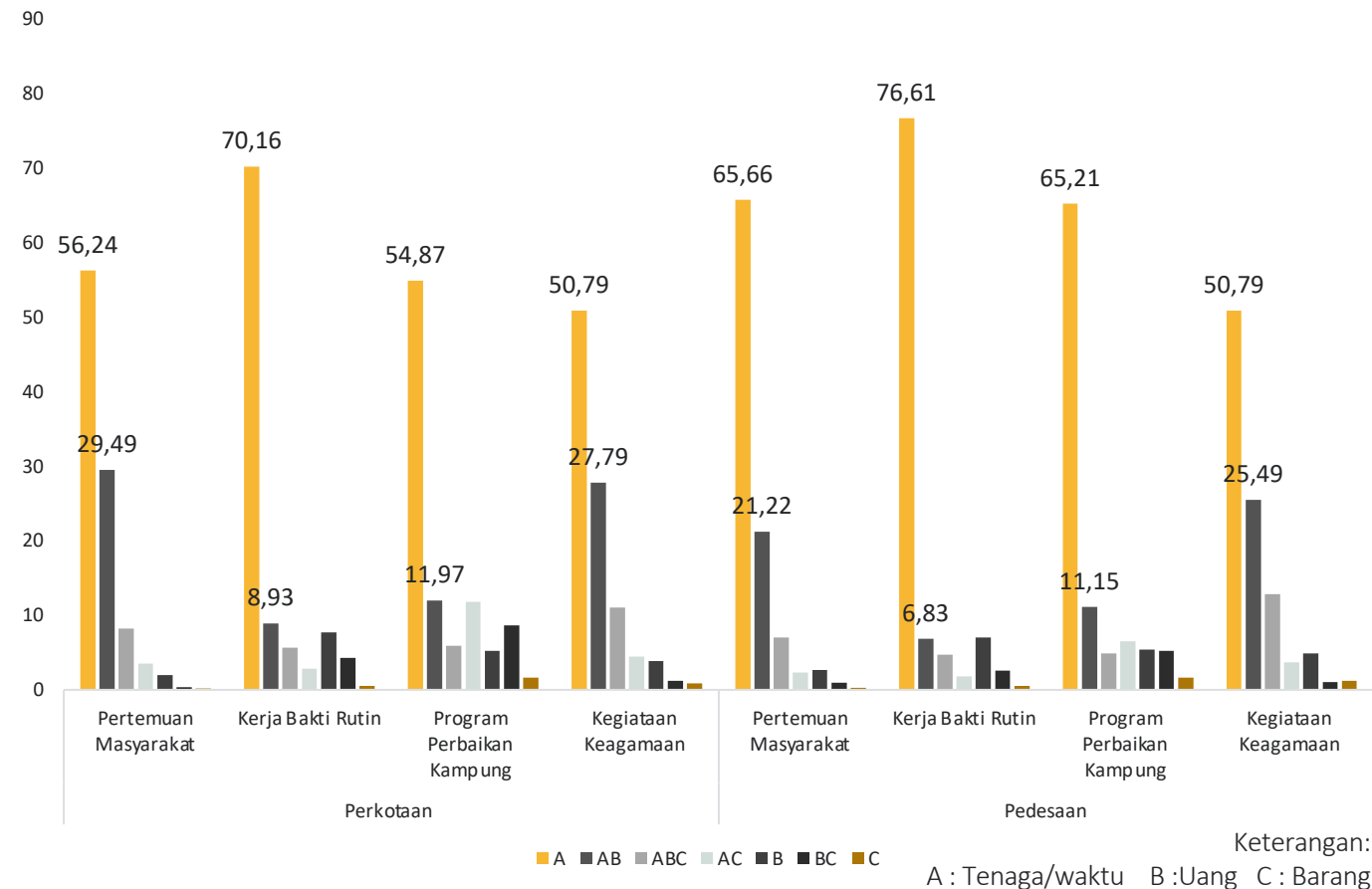


Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Cukup Tinggi

Partisipasi masyarakat Indonesia Menurut Tempat Tinggal (dalam %)



Persentase Jenis Kontribusi Pada Kegiatan Sosial (dalam %)



- Partisipasi masyarakat pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan.
- Kegiatan keagamaan adalah kegiatan sosial yang paling banyak diikuti oleh masyarakat. Kontribusi terbanyak masyarakat pada kegiatan sosial adalah tenaga/waktu, diikuti oleh uang dan barang.

CAPAIAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN SOSIAL

Belum Semua Penduduk Tercatat

Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tahun 2020

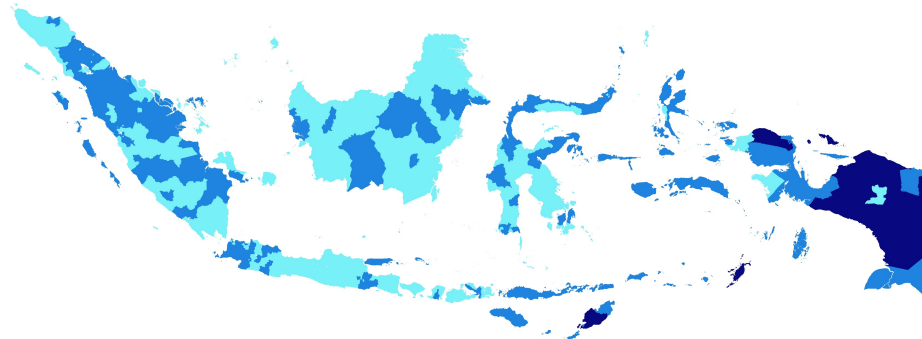
Cakupan Kepemilikan (Susenas 2020)

96,37 % (↑1,21% dari 2019)

Target Nasional (RKP 2021)

98,00%

Persebaran di 34 Provinsi

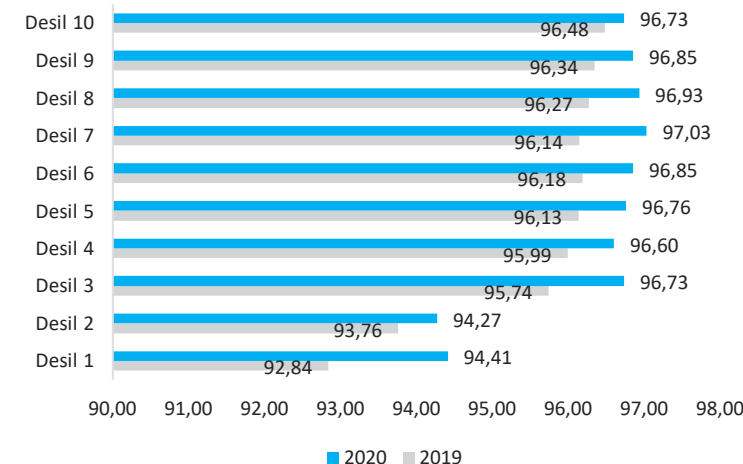


LEGENDA

Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan

- < 80,00%
- 80,01% - 95,00%
- > 95,01%

Persebaran Menurut Desil



Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun pada Tahun 2020

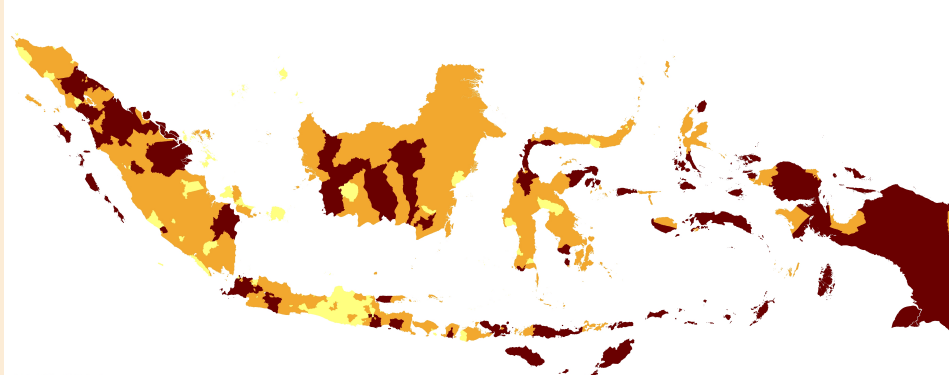
Cakupan Kepemilikan (Susenas 2020)

86,57 % (↑ 0,56% dari 2019)

Target Nasional (RKP 2021)

92,00%

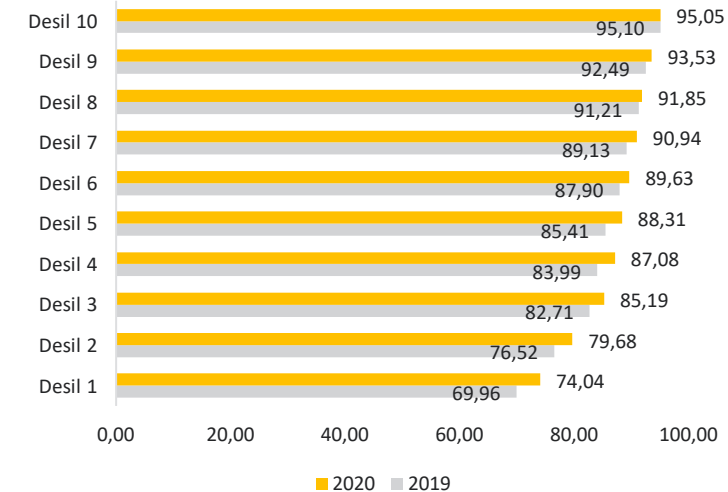
Persebaran di 34 Provinsi



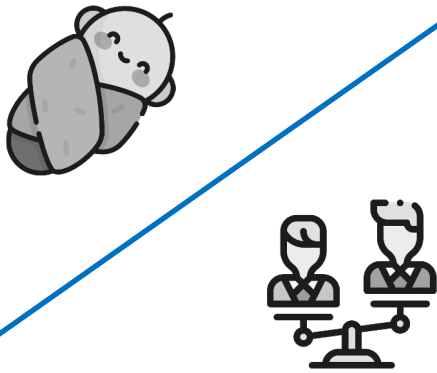
LEGENDA

- < 80,00%
- 80,01% - 95,00%
- > 95,01%

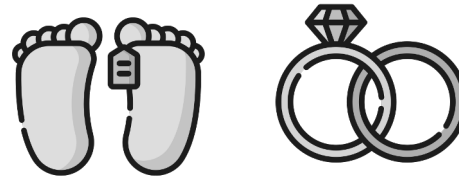
Persebaran Menurut Desil



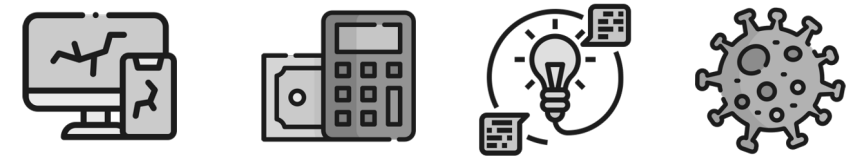
Capaian dan Tantangan Tata Kelola Kependudukan



Indonesia masih **on track** dalam **pencapaian target akta kelahiran**, namun keterbatasan **kapasitas** dan kondisi daerah yang berbeda-beda menjadi salah satu alasan pelambatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.



Pencatatan perkawinan, perceraian, kematian dan penyebab kematian belum mencapai skala luas.



Hambatan peningkatan cakupan dokumen kependudukan ada pada:

- 1) **keterbatasan kapasitas fasilitas;**
- 2) **biaya** untuk mencapai titik layanan;
- 3) **pengetahuan masyarakat** terhadap persyaratan dan urgensi kepemilikan dokumen kependudukan dinilai belum tinggi; dan
- 4) **perlambatan kinerja pelayanan** dokumen kependudukan akibat pandemi.

Capaian dan Tantangan Jaminan Sosial



Capaian **cakupan peserta JKN** sampai dengan Oktober 2020 sebesar **82,44% (belum UHC)**.

Hambatan dalam pelaksanaan **program JKN** antara lain:

- 1) ketidakpatuhan peserta dalam mendaftar dan membayar iuran;
- 2) penjangkauan sektor informal yang belum optimal;
- 3) meningkatnya peserta yang tidak mampu membayar iuran.

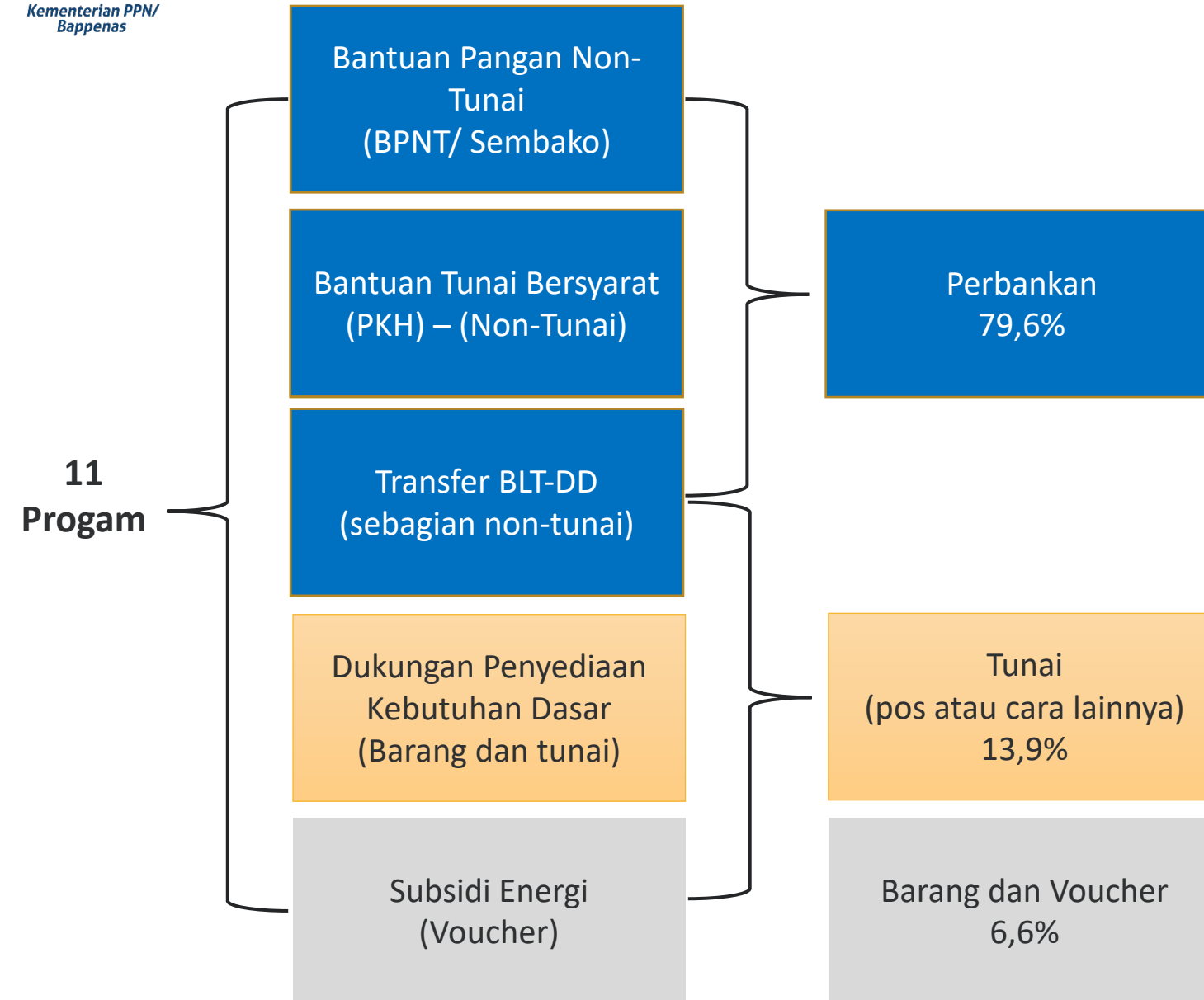


Capaian **cakupan peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan** pada TW III 2020 sebesar **22,6%**.

Hambatan dalam pelaksanaan **program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** yaitu

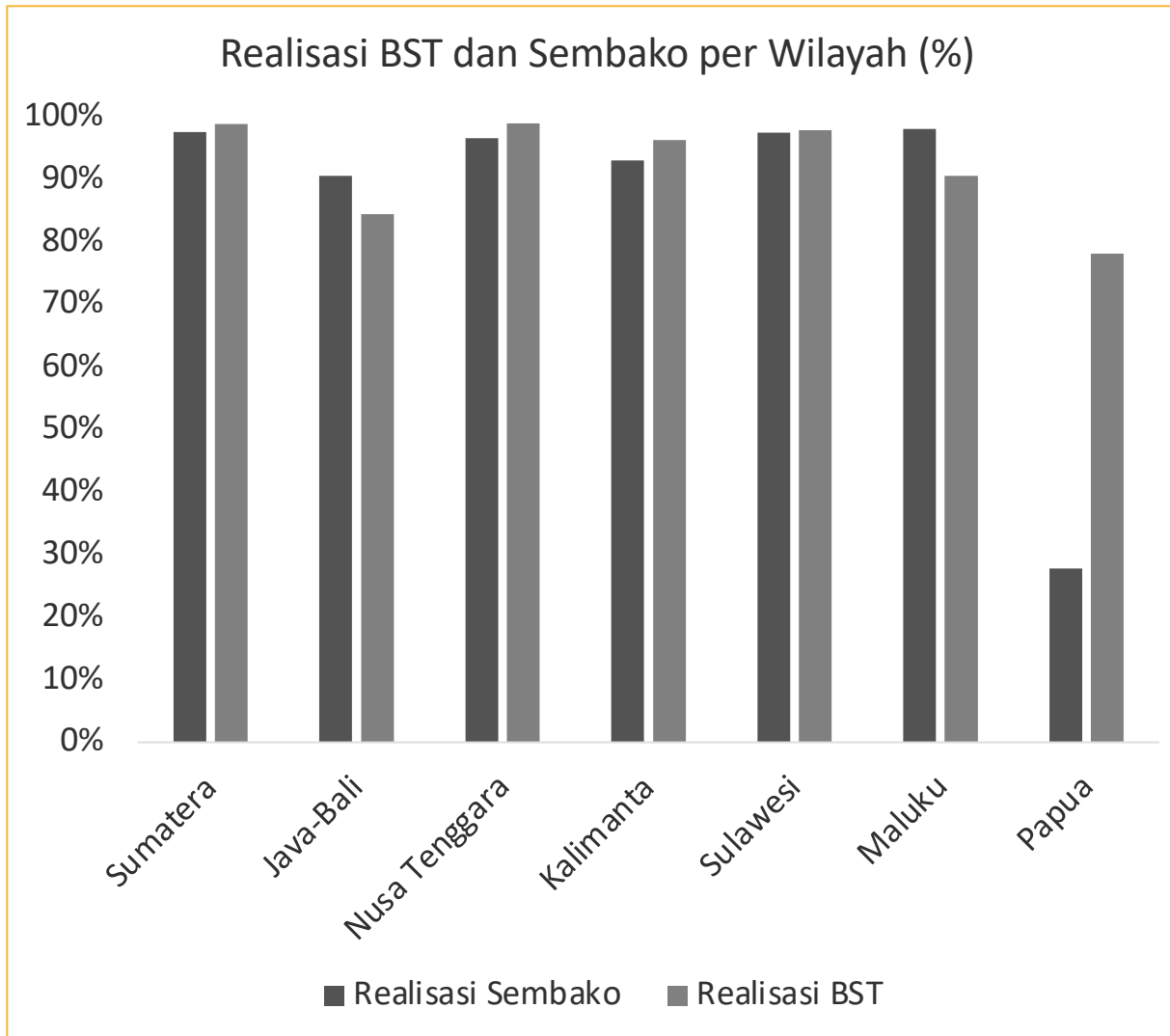
- 1) perluasan peningkatan kepesertaan terutama **pekerja sektor informal mengalami perlambatan**;
- 2) masih cukup banyak **peserta yang tidak aktif atau berhenti** membayar iuran; dan
- 3) **belum seluruh pemberi kerja patuh** dalam mendaftarkan dan membayar iuran pekerjanya.

Transformasi Digital Memastikan Penyaluran Bantuan Sosial Mudah dan Cepat



- Sebagian besar penerima manfaat PKH menerima manfaat pada bulan Mei (1,5 bulan setelah kasus pertama). (Bappenas, Kemensos, JPAL, 2020)
- Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Khusus di DKI Jakarta, gelombang pertama diterima pada April 2020 (1 bulan setelah kasus pertama) (Kemensos).
- Sebanyak 55% rumah tangga mengandalkan bantuan pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan selama Pandemi Covid-19.
- Manfaat bantuan lebih signifikan dirasakan lansia dan berpendidikan rendah khususnya di DKI Jakarta. (Bank Dunia, 2020).

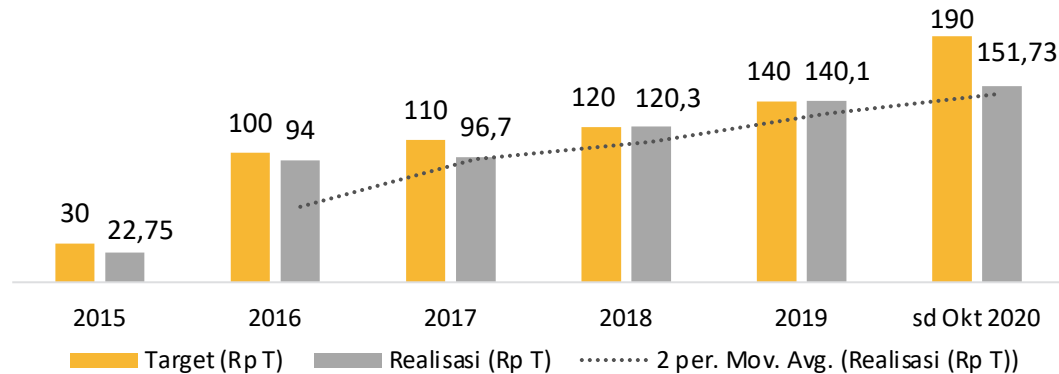
Tantangan masih terlihat dalam Penyaluran di Papua dan Papua Barat



- Realisasi Bantuan Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai secara nasional sudah di atas 90%.
- Kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan social yaitu kondisi geografis yang cukup berat khususnya di wilayah Papua dan papua Barat.
- Memastikan integrasi program perlindungan sosial untuk mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang lebih cepat.
- Memastikan manfaat program sesuai dengan kebutuhan.
- Memastikan penyaluran program tepat sasaran bagi seluruh penduduk.

Capaian dan Tantangan UMKM dan Koperasi

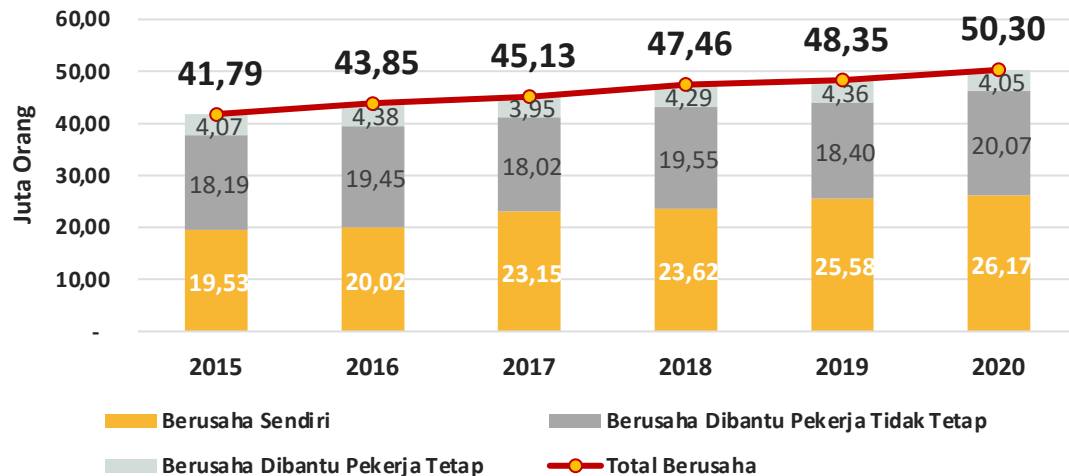
Target dan Realisasi KUR per Tahun (Rp Triliun)



Capaian Program Strategis

- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2020 (hingga 31 Oktober) mencapai Rp151 triliun bagi 4,6 juta debitur.
- Jumlah penduduk dengan pekerjaan utama sebagai pengusaha terus meningkat setiap tahunnya.
- Penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM juga menunjukkan penyerapan yang baik, terutama Banpres Produktif bagi usaha mikro serta Pembiayaan Investasi Kepada Koperasi Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.

Jumlah Penduduk dengan Pekerjaan Utama Pengusaha



Tantangan dalam Pengembangan UMKM

- Pelaksanaan program pengembangan UMKM belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, serta tersebar di berbagai K/L.
- Peran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator pengembangan UMKM masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan sumber daya.
- Belum tersedianya basis data UMKM yang andal.
- Belum optimalnya layanan konsultasi & pendampingan UMKM.

Isu Utama Pengembangan UMKM dan Koperasi



Adanya **perbedaan definisi** UMKM antar lembaga serta **belum adanya basis data** yang terintegrasi.



Jumlah UMKM yang besar **belum seimbang dengan kontribusinya pada PDB**.



Rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global (*global value chain*).



Akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah.



Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi.

- **99%** usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM.
- UMKM hanya berkontribusi **57%** terhadap PDB.

- **93%** usaha mikro dan kecil (UMK) tidak menjalin kemitraan.
- UMKM berkontribusi sebesar **14%** terhadap total ekspor Indonesia.

- **88%** UMK tidak memperoleh atau mengajukan kredit.
- Rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan **20%**.

- **94%** UMK tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya.
- **90%** UMK tidak menggunakan internet.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN SOSIAL

Mendorong Pengurangan Pengangguran

Pemulihan Ekonomi untuk Penciptaan Kesempatan Kerja (*Demand*)

01

Memulihkan **kinerja sektor-sektor yang dapat menciptakan kesempatan kerja**:

- Meningkatkan investasi;
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan;
- Mendorong industri pengolahan;
- Mendorong pariwisata.

02

Memulihkan **kegiatan ekonomi kreatif dan UMKM**, serta mendorong pertumbuhan **UMKM baru dan kewirausahaan**.

03

Meningkatkan **iklim usaha yang kondusif** dan **perlindungan pekerja**, termasuk memastikan kepatuhan **protokol kesehatan** dalam kegiatan usaha untuk pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan kerja.

04

Mengoptimalkan pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dapat memberikan lapangan kerja sementara bagi tenaga kerja lokal, seperti padat karya tunai, pembangunan infrastruktur sederhana.

Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja agar Produktif dan Berdaya Saing (*Supply*)

05

Meningkatkan **keahlian angkatan kerja** dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan industri, antara lain:

- Mengembangkan mekanisme **pendidikan/pelatihan (*blended training*) berbasis digital**;
- Meningkatkan penyelenggaraan **diklat-sertifikasi-penempatan** untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.

06

Mengembangkan sistem informasi pasar kerja:

- Memetakan dan memproyeksikan kebutuhan pasar kerja;
- Melakukan *matching* dengan ketersediaan angkatan kerja.

07

Meningkatkan **perlindungan sosial bagi pekerja**: Kartu Prakerja, bantuan subsidi upah/gaji bagi pekerja berupah rendah, relaksasi pembayaran iuran dan tunggakan jaminan sosial, dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan lebih lengkap (termasuk jaminan kehilangan pekerjaan).

Memastikan Masyarakat Terlindungi



Kependudukan



Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan **layanan jemput bola, pelayanan daring, penerapan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan Tanda Tangan Elektronik (TTE)**.



Peningkatan kesadaran seluruh penduduk untuk mencatatkan peristiwa kependudukan melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi.



Percepatan **kepemilikan** dokumen kependudukan khususnya **penduduk rentan**.



Peningkatan **ketersediaan statistik hayati**.



Penguatan **kolaborasi** antar OPD.



Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.



Jaminan Sosial



Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi.



Pelaksanaan **Kelas Rawat Inap Standar** Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



Pelaksanaan **Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)**



Riviu dan perumusan manfaat berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Dasar Kesehatan.



Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menata Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

1. TRANSFORMASI DATA MENUJU REGISTRASI SOSIAL-EKONOMI

Perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi 100% penduduk.

2. INTEGRASI PROGRAM DAN PENINGKATAN SDM PENDAMPING

Integrasi dan koordinasi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial. Layanan rujukan terpadu dan sertifikasi SDM.

3. PENGEMBANGAN MEKANISME DISTRIBUSI

Pengembangan distribusi secara digital (untuk transfer tunai), dan *platform* PT. POS maupun *Ojek Online* untuk perkotaan (sembako dan bantuan lainnya).

4. PENGEMBANGAN SKEMA PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF

Adaptasi skema perlindungan sosial karena adanya guncangan alam, sosial ekonomi, dan kesehatan.

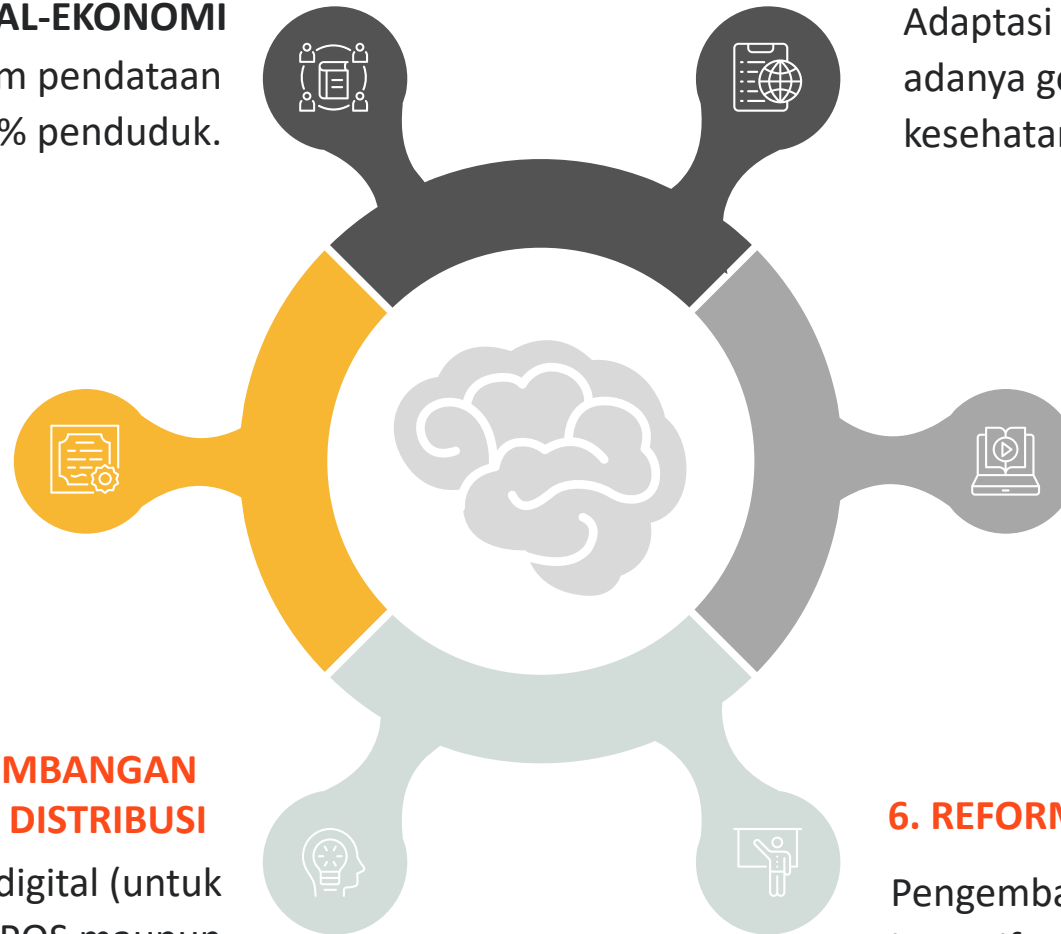
5. DIGITALISASI PENYALURAN

Menggunakan:

- *platform* digital (integrasi data);
- NIK;
- e-KYC dan pembukaan satu rekening bansos; dan
- *platform* pembayaran perbankan dan *fintech*.

6. REFORMASI SKEMA PEMBIAYAAN

Pengembangan skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan.



Mengembangkan UMKM dan Koperasi

Fokus Pengembangan

Pemulihan usaha dan akselerasi proses adaptasi dan transformasi UMKM



Insentif fiskal untuk mengurangi beban operasional usaha.



Penyediaan **modal** kerja.



Fasilitasi transformasi usaha, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan.



Digitalisasi usaha.



Peningkatan konsumsi dan permintaan produk UMKM, termasuk pengembangan kemitraan usaha.

Strategi Akselerasi Pengembangan UMKM



Penguatan Kelembagaan, termasuk penguatan peran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator pengembangan UMKM, perbaikan pendataan UMKM, serta penguatan konsultan bisnis dan lembaga pendampingan.

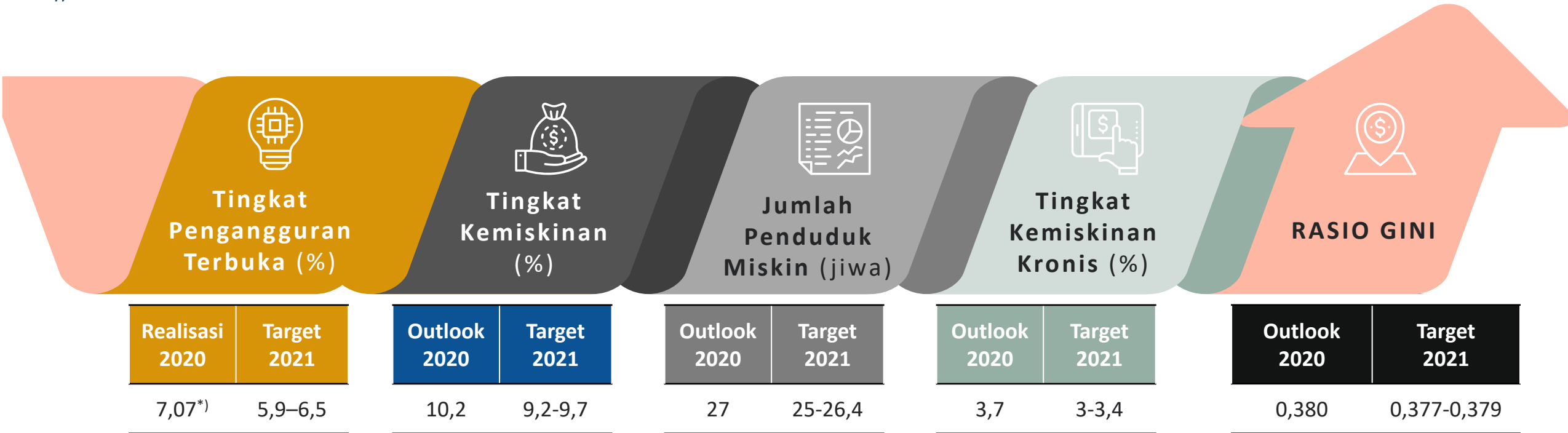


Akselerasi Program Strategis, termasuk kemitraan strategis, ruang bersama, pusat layanan dan *expert pool*, serta perluasan pasar dan inovasi pembiayaan.



Dukungan regulasi berupa penyelesaian PP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (mandat UU Cipta Kerja) serta Strategi Nasional Pengembangan UMKM.

Penutup



1. Ketahanan masyarakat perlu terus dibangun

- **Adaptif** → *new way of doing things* untuk hidup lebih berkualitas.
- Membangun data (akurasi, akses, kemampuan analisis).
- **Literasi digital dan modal sosial** dapat mempercepat proses.

2. Implikasi dari UU Cipta Kerja:

- UU CK diharapkan dapat **mendorong investasi** untuk menciptakan lebih banyak **kesempatan kerja baru yang produktif dan layak** (*decent*).
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi tambahan skema jaminan sosial → terkait erat dengan kemampuan penyediaan pelatihan dan lapangan kerja.



TERIMA KASIH